



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN  
RANCANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**

**TANJUNGPANDAN, AGUSTUS 2024**

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

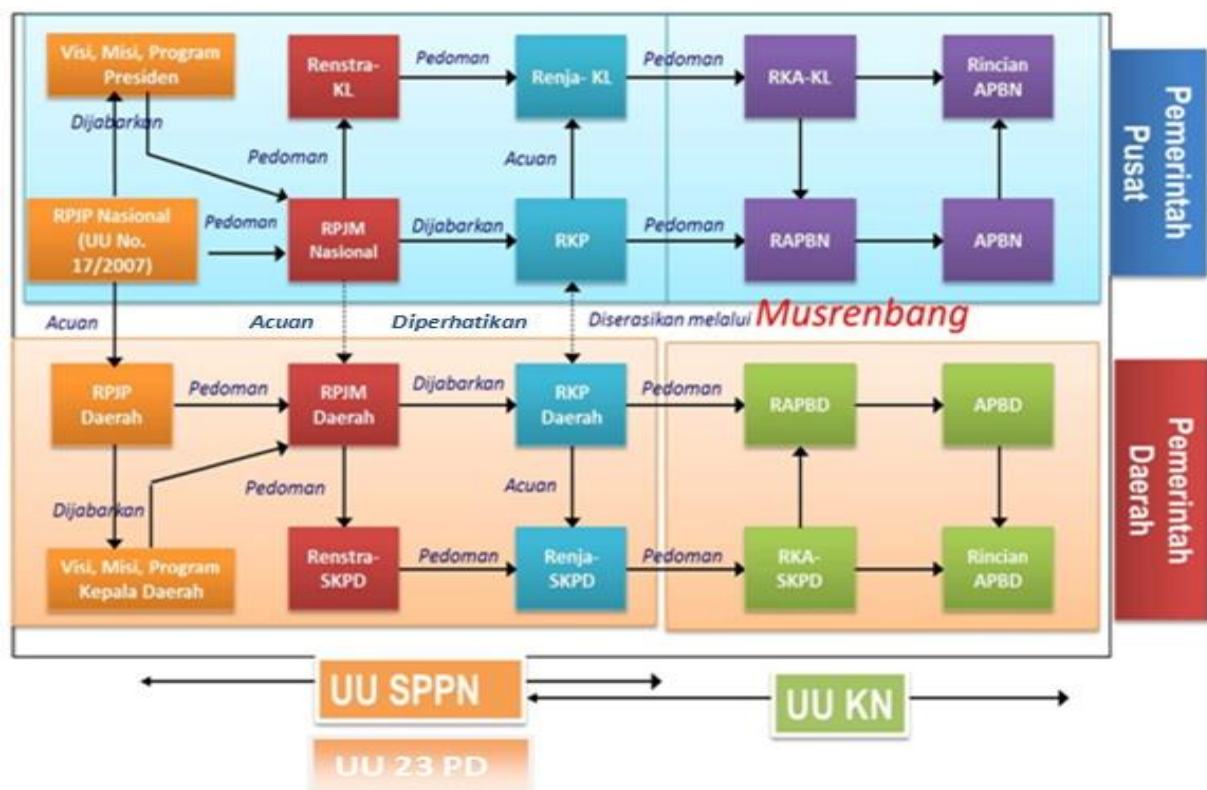
### 1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan tersebut Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Berdasarkan persatuan diatas dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023;
  28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  29. Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026;
  30. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026;
  31. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  32. Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

**Tujuan** dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya melaksanakan Pelayanan;

- 
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan;
  5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

#### **BABI      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

---

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024**

Perubahan Rencana Akhir Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

Pencapaian pada Tahun 2024 merupakan Pencapaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024**  
**TRIWULAN II**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket era ngn
				5	6	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Semua Bidang</b>																											
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0.00	-	100.00	-	100	9,653,738,414	1,698,231,316	3,954,224,563	-	-	-	5,652,455,879	0.00%	58.55%	5,652,455,879	0.00%	BPKAD	-						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0.00	-	9	5,257,400	3	-	360,000	-	-	3	360,000	33.33%	6.85%	3.00	360,000	0.00%	0.00%	-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0.00	-	2	920,000	-	-	1	-	-	1	-	50.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	0.00	-	1	947,200	-	-	1	-	-	1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	0.00	-	1	747,200	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	-					



		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)		-	0.00	-	1	1,062,972,900	-	119,330,790	-	272,721,400	-	-	-	392,052,190	0.00%	36.88%	0.00	392,052,190	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	2	45,123,630	-	240,000	1	390,000			1	630,000	50.00%	1.40%	1.00	630,000	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	1	25,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	2	270,671,040	-	19,866,500	1	65,736,000			1	85,602,500	50.00%	31.63%	1.00	85,602,500	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	2	51,628,230	-	-	1	3,168,600			1	3,168,600	50.00%	6.14%	1.00	3,168,600	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0.00	-	1	10,000,000	-	1,040,000	-	2,680,000			-	3,720,000	0.00%	37.20%	0.00	3,720,000	0.00%	0.00%		-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0.00	-	12	650,000,000	1	98,184,290	1	200,746,800			1	298,931,090	4.17%	45.99%	0.50	298,931,090	0.00%	0.00%		-
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis barang milik daerah (Jenis)		-	0.00	-	12	338,316,632	2	-	-	104,300,000			2	104,300,000	16.67%	30.83%	2.00	104,300,000	0.00%	0.00%		-
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	10	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	20	273,316,632	-	-	7	104,300,000			7	104,300,000	35.00%	38.16%	7.00	104,300,000	0.00%	0.00%		-
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)		-	0.00	-	1	646,815,900	-	113,157,139	-	260,541,231			-	373,698,370	0.00%	57.78%	0.00	373,698,370	0.00%	0.00%		-

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0.00	-	12	7,240,000	1	460,000	1	570,000					1	1,030,000	4.17%	14.23%	0.50	1,030,000	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	276,040,000	1	57,400,139	1	115,632,631					1	173,032,770	4.17%	62.68%	0.50	173,032,770	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	363,535,900	1	55,297,000	1	144,338,600					1	199,635,600	4.17%	54.91%	0.50	199,635,600	0.00%	0.00%		-
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)		-	0.00	-	18	478,531,660	5	2,917,800	-	53,507,000					5	56,424,800	27.78%	11.79%	5.00	56,424,800	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0.00	-	15	106,779,600	4	909,000	4	3,098,200					8	4,007,200	53.33%	3.75%	8.00	4,007,200	0.00%	0.00%		-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0.00	-	9	95,610,250	2	2,008,800	3	2,368,800					5	4,377,600	55.56%	4.58%	5.00	4,377,600	0.00%	0.00%		-
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		-	0.00	-	112	6,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0.00	-	142	75,174,750	35	-	37	-					72	-	50.70%	0.00%	72.00	-	0.00%	0.00%		-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0.00	-	5	194,967,060	1	-	2	48,040,000					3	48,040,000	60.00%	24.64%	3.00	48,040,000	0.00%	0.00%		-
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	18.93%	58.55%						-
																			<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Rendah						-
		<b>KEUANGAN</b>																									-



		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Dokumen)		-	0.00	-	6	294,332,448	1	-	-	103,548,100	-	-	1	103,548,100	16.67%	35.18%	1.00	103,548,100	0.00%	0.00%		-
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		-	0.00	-	2	173,029,540	1	-	-	103,548,100			1	103,548,100	50.00%	59.84%	1.00	103,548,100	0.00%	0.00%		-
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0.00	-	2	57,458,640	-	-	1	-			1	-	50.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%		-
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)		-	0.00	-	2	2,131,756	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		-
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		-	0.00	-	95	61,712,512	24	-	26	-			50	-	52.63%	0.00%	50.00	-	0.00%	0.00%		-
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Laporan)		-	0.00	-	4	107,116,867,728	1	12,454,185,750	-	53,866,311,151	-	-	1	66,320,496,901	25.00%	61.91%	1.00	66,320,496,901	0.00%	0.00%		-
		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)		-	0.00	-	1	693,409,628	-	375,000	1	2,217,249			1	2,592,249	100.00%	0.37%	1.00	2,592,249	0.00%	0.00%		-





---

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung pada tahun pertama Renstra belum bisa disajikan secara penuh, tetapi tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi 2024	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.1	Ketersediaan dokumen dokumen rancangan anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	-	-	70%	75%	80%	86%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	
2.2	Ketersediaan dokumen dokumen pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.3	Ketersediaan dokumen dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	-	-	87%	89%	91%	93%	87%	100%	100%	100%	100%	90%	
2.4	Ketersediaan dokumen dokumen pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	-	-	89%	90%	91%	92%	60%	100%	100%	100%	100%	65%	

---

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah permasalahan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan belum optimalnya pengamanan barang milik daerah disebabkan :

1. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dalam perencanaan dan penyusunan penganggaran berbasis teknologi informasi.
2. Penggunaan SIPD Penatausahaan dan Pelaporan belum optimal.
3. Pemahaman OPD terhadap Akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan belum merata.
4. Masih rendahnya pemahaman pemangku kebijakan pada proses penyusunan Laporan Keuangan.
5. Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah belum bersertifikat.
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pejabat pengelola barang tingkat OPD.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang diangkat sebagai isu-isu penting oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, diantaranya:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis teknologi informatika;
2. Implementasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD);
3. Implementasi Akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada proses penyusunan laporan keuangan;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah masih perlu ditingkatkan;
5. Kualitas Sumber daya manusia pengelolaan keuangan belum optimal.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan keseluruhan belanja berkurang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					140,857,860,956.00					123,100,985,524.00	
	<b>KEUANGAN</b>				140,857,860,956.00					123,100,985,524.00		
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tanjung pandan	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	9,661,230,272.00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tanjung pandan	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	9,751,414,634.00		
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%			
			3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%			
			4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%				4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%			
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,257,400.00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,257,400.00		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	920,000.00	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	920,000.00		
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	947,200.00	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	947,200.00		
	3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	747,200.00	3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	747,200.00		

	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	947,000.00	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	947,000.00	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	749,000.00	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	749,000.00	
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	947,000.00	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	947,000.00	
2.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>6,919,835,780.00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>6,923,519,032.00</b>	
			<b>Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan</b>					<b>Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	6,915,042,980.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	6,918,726,232	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,784,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,784,000.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,008,800.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,008,800.00	
3.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhiya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36 Orang</b>	<b>109,500,000.00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhiya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36 Orang</b>	<b>109,500,000.00</b>	
			<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>75 %</b>				<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>75 %</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	24,500,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	24,500,000.00	
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85,000,000.00	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85,000,000.00	
4.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,162,972,900.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,062,953,010.00</b>	
			<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat</b>	<b>100 %</b>				<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat</b>	<b>100 %</b>		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45,123,630.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45,123,630.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,550,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,550,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	270,671,040.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	270,671,040.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51,628,230.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51,608,340.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	750,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	650,000,000.00	
<b>5.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jenis Barang milik Daerah</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>338,316,632.00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jenis Barang milik Daerah</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>522,269,162.00</b>	
		<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 100%</b>			<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 100%</b>		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 -	0.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 -	0.00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	65,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	65,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	273,316,632.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	457,269,162.00	
<b>6.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Layanan administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>646,815,900.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Layanan administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>649,387,700.00</b>	
		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,240,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,240,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	276,040,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	276,040,000.00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	363,535,900.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366,107,700.00	
7.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Barang Milih Daerah dalam kondisi Baik</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>478,531,660.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Barang Milih Daerah dalam kondisi Baik</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>478,528,330.00</b>	
			<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 100%</b>				<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 100%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	106,779,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	106,779,600.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	95,610,250.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	95,610,250.00	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	112 Unit	6,000,000.00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	112 Unit	6,000,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	75,174,750.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	75,174,750.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	194,967,060.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	194,963,730.00	
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tanjung Pandan	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</b>		<b>129,469,515,940.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tanjung Pandan			<b>111,642,917,033.00</b>	
2.1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah</b>		<b>Dokumen Rancangan Anggaran Daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1,173,189,492.00</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah</b>		<b>Dokumen Rancangan Anggaran Daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1,073,189,492.00</b>	
			<b>Tersusunnya Dokumen Rancangan Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>				<b>Tersusunnya Dokumen Rancangan Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>		
	Koordinasi dan penyusun KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60,821,439.00	Koordinasi dan penyusun KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60,821,439.00	
	Koordinasi dan penyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	67,293,389.00	Koordinasi dan penyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	67,293,389.00	

	koordinasi dan penyusun peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	561,942,980.00	koordinasi dan penyusun peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	471,942,980.00	
	Koordinasi dan penyusun peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	483,131,684.00	Koordinasi dan penyusun peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	473,131,684.00	
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>: Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>257,138,000.00</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>: Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>257,138,000.00</b>	
			<b>: Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>				<b>: Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	178,494,550.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	178,494,550.00	
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	133 Orang	78,643,450.00	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	133 Orang	78,643,450.00	
<b>2.3</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>294,332,448.00</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>294,332,448.00</b>	
			<b>Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan yg disusun yang akurat dan sesuai peraturan dan ketentuan yg berlaku</b>					<b>Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan yg disusun yang akurat dan sesuai peraturan dan ketentuan yg berlaku</b>			
	Konsolidasi laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	173,029,540.00	Konsolidasi laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	173,029,540.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57,458,640.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57,458,640.00	
	Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2,131,756.00	Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2,131,756.00	
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	95 Orang	61,712,512.00	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	95 Orang	61,712,512.00	
<b>2.4</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>: Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>127,719,236,000.00</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>: Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>109,992,637,093.00</b>	
			<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>				<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>		
	Penyusunan Kebijakan Dan Alokasi subsidi		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1,393,200,000.00	Penyusunan Kebijakan Dan Alokasi subsidi		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	693,409,628.00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	98,480,816,000.00	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	97,034,953,900.00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	18,500,000,000.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2,500,000,000.00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	9,345,220,000.00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	9,764,273,565.00	
<b>2.5</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Data dan informasi keuangan daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>25,620,000.00</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Data dan informasi keuangan daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>25,620,000.00</b>	
			<b>Persentase data dan informasi keuangan daerah yang dikelola</b>	<b>%</b>				<b>Persentase data dan informasi keuangan daerah yang dikelola</b>	<b>%</b>		

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	25,620,000.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	25,620,00.00	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Tanjung Pandan	<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>	<b>1,727,114,744.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Tanjung Pandan	<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>	<b>1,706,653,857.00</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>1,727,114,744.00</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>1,706,653,857.00</b>	
			<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>				<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</b>	<b>100 %</b>		
	Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	57,957,350.00	Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	82,140,820.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	45,105,972.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	74,474,672.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	127,703,120.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	429,631,560.00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang	1 Laporan	121,102,750.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang	1 Laporan	175,996,980.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	809,305,652.00	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	313,198,420.00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Aset daerah yang Dipindahtanganan, dimanfaatkan dan dihapuskan	1 Dokumen	402,365,780.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Aset daerah yang Dipindahtanganan, dimanfaatkan dan dihapuskan	1 Dokumen	475,805,455.00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	163,574,120.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	155,405,950.00	

---

## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan dibidang keuangan.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dengan **sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”** melalui strategi **“Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah”** dan **“Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah”**.

#### **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan**

Dapat diartikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

Dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan dengan terukur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tersebut diatas tetap memperhatikan uraian tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* yang dilandasi asas transparan, yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan aset daerah; asas keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan

---

pendanaannya dan/atau keseimbangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif, asas manfaat, artinya, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan aset daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan berkualitas jika beberapa kriteria berikut bisa tercapai, yaitu:

1. Didukung oleh SDM yang Profesional

BPKAD Kabupaten Belitung sebagai institusi Keuangan Daerah mengemban fungsi manajemen di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan.

2. Berbasis kondisi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal;

3. Mendukung kebijakan desentralisasi fiskal

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus tetap pada kerangka dan arah desentralisasi fiskal yang merupakan instrumen bagi Pemerintah Pusat dan Daerah guna mendukung dan menjaga netralitas fiskal secara Nasional;

4. Akomodatif terhadap dinamika global

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan bahwa Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah menghadapi arus globalisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung bisa dilihat pada tabel berikut:

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja		
			2024	2025	2026
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Tingkat Kesesuaian dokumen pengelolaan keuangan terhadap ketentuan yang berlaku	100%	87%	98%	100%
	Tingkat Kesesuaian dokumen pengelolaan barang milik daerah terhadap ketentuan yang berlaku	50%	60%	70%	80%

Keterangan:

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

### 3.3. Program, kegiatan dan Sub kegiatan

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan

---

pengolahan administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Sifat sub kegiatan dari kegiatan dan program ini merupakan sub kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Rencana sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen perencanaan, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah, Rencana Kerja SKPD berupa Ranwal dan Ranhir Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, Indikator Sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja, indikator sub kegiatan ini adalah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;  
Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;  
Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;  
Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- 
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas atau pakaian khusus hari-hari tertentu untuk pegawai.
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maka diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan daerah.
  4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;
    - a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Sub kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan sub kegiatan ini. Indikator dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum kantor dan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional.
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen kebutuhan administrasi perkantoran.
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program sub kegiatan.
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

---

Bentuk Sub kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD. Indikator Sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah;

a. Pengadaan Mebel ;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor untuk mendukung operasional.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung operasional.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan sub kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis. Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya belanja jasa surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kesejahteraan bagi pegawai non PNS.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- 
- c. Pemeliharaan Mebel;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Mebel yang Dipelihara

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya sehingga selalu siap untuk dipergunakan untuk operasional kantor;

- e. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.

## **B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Program ini adalah program yang dilaksanakan oleh bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

Sub kegiatan ini adalah perubahan/penyesuaian nama sub kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD pada tahun anggaran 2021. Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah per tahun anggaran.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan

---

daerah tentang perubahan APBD yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada tahun anggaran 2023 bermaksud memberikan pelayanan yang maksimal dalam proses penginputan dan pembuatan laporan. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah.

b. Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan Pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Indikator dari sub kegiatan ini adalah perangkat daerah yang didampingi dalam penatusahaan keuangan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

a. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan yang merupakan hasil pelaksanaan seluruh sub kegiatan sebagai dasar prognosis rencana sub kegiatan pada priode selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan perkiraan pembiayaan dan pelaksanaan pada priode ke depan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan ini mengarah kepada segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

c. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD;

Sub kegiatan ini mengarah pada pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

- 
- d. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;

Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi subsidi  
Meliputi penyaluran dana subsidi Pemerintah Kabupaten Belitung kepada BUMD yang dalam hal ini adalah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung. Selain itu subsidi juga disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;  
Sub kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan meliputi penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
  - c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;  
Indikator hasil sub kegiatan ini adalah belanja tidak terduga dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
  - d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;  
Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten meliputi penyaluran bagi hasil dari pemerintah Kabupaten kepada Desa atas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;  
Sub kegiatan ini Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2024. Indikator dari sub kegiatan ini adalah selalu tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mutakhir setiap saat.

### **C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Program ini adalah program yang dilaksanakan oleh bidang aset, Adapun penyajian dari program dari kegiatan ini diarahkan dalam bentuk pelaksanaan sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - a. Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;  
Sub kegiatan mengarah pada penganalisaan standar belanja yang akan digunakan pemerintah daerah, indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah standar belanja

---

pemerintah daerah yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro.

- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah;  
Indikator terlaksananya pendampingan terhadap SKPD/ UPB dalam pelaksanaan pengelolaan BMD dan pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang mutakhir setiap saat.
- d. Inventarisasi Barang Milik Daerah;  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data Barang Milik Daerah yang mutakhir.
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah;  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung.
- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah hasil evaluasi terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipergunakan oleh stake holder.
- g. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Barang Milik Daerah baik berupa laporan semesteran maupun laporan tahunan.

Rumusan Rencana Program dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Belitung tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

## RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG

### TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							140.857.860.956,00	120.148.000.826,00	123.100.985.524,00							140.637.998.850,00		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							140.857.860.956,00	120.148.000.826,00	123.100.985.524,00							140.637.998.850,00		
					KEUANGAN							140.857.860.956,00	120.148.000.826,00	123.100.985.524,00							140.637.998.850,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan			100 %	100 %	9.661.230.272,00	9.653.738.414,00	9.751.414.634,00								10.097.055.850,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		9 Dokumen	9 Dokumen	5.257.400,00	5.257.400,00	5.257.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-			5.517.500,00	BPKAD
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan				950.000,00	BPKAD
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	947.200,00	947.200,00	947.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan				997.500,00	BPKAD
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	747.200,00	747.200,00	747.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				787.500,00	BPKAD
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	947.000,00	947.000,00	947.000,00	Kab. Belitung, Tanjung	Dana Transfer Umum-	-	-				997.500,00	BPKAD



						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.162.972.900,00	1.062.972.900,00	1.062.972.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.188.004.550,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.150.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.123.630,00	45.123.630,00	45.123.630,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			47.500.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	270.671.040,00	270.671.040,00	270.671.040,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			261.381.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.628.230,00	51.628.230,00	51.608.340,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			49.973.550,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			785.000.000,00	BPKAD

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	-			12 Jenis	12 Jenis	338.316.632,00	338.316.632,00	338.316.632,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			345.500.000,00	BPKAD
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.500.000,00	BPKAD
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	28 Unit	273.316.632,00	273.316.632,00	457.269.162,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			280.000.000,00	BPKAD
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	646.815.900,00	646.815.900,00	646.815.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			679.450.000,00	BPKAD
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	BPKAD
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	276.040.000,00	276.040.000,00	276.040.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			290.150.000,00	BPKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	363.535.900,00	363.535.900,00	366.107.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			381.700.000,00	BPKAD
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-			18 Jenis	18 Jenis	478.531.660,00	478.531.660,00	478.531.660,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			497.769.000,00	BPKAD
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	106.779.600,00	106.779.600,00	106.779.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			111.969.000,00	BPKAD

5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	95.610.250,00	95.610.250,00	95.610.250,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.500.000,00	BPKAD	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				112 Unit	20 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	BPKAD	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	142 Unit	75.174.750,00	75.174.750,00	75.174.750,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			79.050.000,00	BPKAD	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	194.967.060,00	194.967.060,00	194.963.730,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			199.750.000,00	BPKAD	
2	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.				100 %	100 %	129.469.515.940,00	108.767.147.668,00	111.642.917.033,00								128.628.984.350,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Rencana Anggaran Daerah	-			8 Dokumen	8 Dokumen	1.173.189.492,00	1.073.189.492,00	1.073.189.492,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.284.375.000,00	BPKAD
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	60.821.439,00	60.821.439,00	60.821.439,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			92.500.000,00	BPKAD	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	67.293.389,00	67.293.389,00	67.293.389,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			87.150.000,00	BPKAD	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	561.942.980,00	471.942.980,00	471.942.980,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			594.825.000,00	BPKAD	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		

							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	483.131.684,00	473.131.684,00	473.131.684,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			509.900.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	257.138.000,00	257.138.000,00	257.138.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.295.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	178.494.550,00	178.494.550,00	178.494.550,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			187.450.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				133 Orang	133 Orang	78.643.450,00	78.643.450,00	78.643.450,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			82.845.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	294.332.448,00	294.332.448,00	294.332.448,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		412.322.850,00	BPKAD
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	173.029.540,00	173.029.540,00	173.029.540,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			278.040.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	57.458.640,00	57.458.640,00	57.458.640,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.375.000,00	BPKAD
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.131.756,00	2.131.756,00	2.131.756,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.007.850,00	BPKAD
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																	

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				95 Orang	95 Orang	61.712.512,00	61.712.512,00	61.712.512,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			69.900.000,00	BPKAD	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		4 Laporan	4 Laporan	127.719.236.000,00	107.116.867.728,00	107.116.867.728,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		126.635.089.500,00	BPKAD	
	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																	
						Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	1.393.200.000,00	693.409.628,00	693.409.628,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.462.900.000,00	BPKAD	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	98.480.816.000,00	94.279.336.100,00	97.034.953.900,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			96.859.718.500,00	BPKAD	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000.000,00	BPKAD	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.345.220.000,00	9.644.122.000,00	9.764.273.565,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.812.471.000,00	BPKAD	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Data dan Informasi Keuangan Daerah	-		1 Laporan	1 Laporan	25.620.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.902.000,00	BPKAD	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.620.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			26.902.000,00	BPKAD	
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah			60 %	60 %	1.727.114.744,00	1.727.114.744,00	1.706.653.857,00							1.911.958.650,00		



---

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Rancangan Rencana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada lampiran Perubahan Rencana Kerja ini.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran.

---

## BAB V

### PENUTUP

Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada *stakeholders* dalam pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan sub kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kebijakan daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

TANJUNGPANDAN, Agustus 2024  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG

  
SISKA PRORITA, S.E  
Pembina  
NIP. 19740325 200312 2 004